

EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Report Evaluation of Performance Accountability University Of Tanjungpura

Rien Pantekostani¹, Ahmad Tohardi², Dwi Haryono³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja UNTAN pada Fakultas Hukum dengan nilai 70.79, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan nilai 56.71 dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dengan nilai 55.83 memberikan kesimpulan secara umum bahwa, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan UNTAN pada Sub Komponen Penyampaian Informasi Kinerja Tahun 2011 belum sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMen PAN dan RB) nomor 29 tahun 2010. Alasan tidak tercapainya penyampaian informasi kinerja yang belum sesuai dengan pedoman, dapat dilihat dari Pengisian Formulir Rencana Kinerja Tahunan dan Formulir Pengukuran Kinerja serta Sistematis Laporan Akuntabilitas Kinerja. Selain itu penyampaian laporan melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Evaluasi Laporan, Akuntabilitas, Kinerja

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Tanjungpura (UNTAN) adalah universitas negeri terbesar di Provinsi Kalimantan Barat dan menjadi salah satu institusi yang ditugaskan untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa, UNTAN diberi tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global, khususnya di Kalimantan Barat. Upaya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tidak mudah, karena itu tujuan harus diupayakan, direncanakan dengan matang dan didukung oleh civitas akademika, karyawan, warga kampus serta pihak-pihak terkait lainnya. Langkah-langkah kebijakan tersebut tidak terlepas dari kerangka *Visi UNTAN* yaitu: Pada tahun 2020 UNTAN menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah tentang Kalimantan Barat serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional. *Misi*: Menyelenggarakan pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat secara berkualitas sehingga dapat menghasilkan luaran yang mampu mengikuti,

¹ PNS Universitas Tanjungpura

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mampu memberikan arah bagi pembangunan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

Kegiatan di fakultas dan satuan kerja yang ada di lingkungan UNTAN dilakukan dengan membuat Program dan Kegiatan yang telah direncanakan untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan dana yang tersedia. Pada akhir tahun anggaran (Januari-Desember) UNTAN dituntut untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tujuan pembuatan LAKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi untuk dipergunakan ditahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdikbud. Penyusunan laporan pada awalnya dengan menyampaikan laporan tengah tahunan dan laporan tahunan. Penyusunan LAKIP dimulai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan berjalannya waktu, ada perubahan sesuai peraturan perundangan-undangan.

Hasil Evaluasi LAKIP secara keseluruhan masih rendah, di Sulawesi Selatan (Sejati, 2012) menunjukkan bahwa dari sampel terhadap beberapa pemerintah daerah, nilai penerapan LAKIP masih dibawah 50% pada tahun 2008. Angka ini sedikit membaik tahun berikutnya dengan adanya dua Kabupaten yang memperoleh nilai di atas 50% meskipun mayoritas masih berkisar 20-40%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sering dianggap sebelah mata, baik oleh anggota dewan ataupun penyelenggara pemerintahan sendiri. LAKIP tidak begitu populer dibandingkan dengan Laporan Keuangan dalam hal proses penyusunan dan manfaat yang bisa dirasakan oleh pengguna. Kalau kualitas laporan keuangan dinilai berdasarkan opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka kualitas LAKIP ditentukan oleh penilaian hasil evaluasi yang dilakukan oleh MENPAN. Meski keduanya dilakukan penilaian oleh pihak ekstern, hingga saat ini kualitas LAKIP masih belum berubah. Kesadaran pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas LAKIP pun sepertinya masih kurang jika dibandingkan dengan keinginan mereka untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan pada fenomena (masalah-masalah) tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang didasarkan pada keingintahuan penulis dalam pencapaian sasaran/kinerja laporan yang disusun fakultas dan satuan kerja Universitas Tanjungpura. Evaluasi dilakukan setelah laporan tersebut disampaikan, dengan demikian akan diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada evaluasi hasil laporan akuntabilitas kinerja dilihat dari komponen pelaporan kinerja pada sub komponen penyampaian informasi kinerja. Formulir yang digunakan adalah formulir pelaporan kinerja dan rencana kinerja tahunan serta pengukuran kinerja.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: "Bagaimana hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan UNTAN pada Sub Komponen Penyampaian Informasi Kinerja Tahun 2011 ?".

TINJAUAN PUSTAKA

Pejabat publik dituntut untuk membuat LAKIP sebagai wujud pertanggungjawabannya sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawabnya. Yusanto (2003:148-150) mengemukakan bahwa sebelum teknik pengawasan atau kegiatan

untuk melakukan evaluasi, harus disusun “pengawasan harus didasarkan pada perencanaan”. Prasyarat yang penting dalam efektivitas pengawasan ialah “struktur organisasi yang jelas, lengkap, dan menyatu”. Tim menyusun LAKIP, harus memiliki kemampuan untuk menyusun laporan sesuai dengan pedoman dan melakukan pengukuran kinerja. Penulis melihat hasil pengukuran kinerja untuk dapat mengetahui tingkat kegagalan dan keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Informasi kegiatan dituangkan kedalam LAKIP dan sesuai tidaknya laporan dengan pedoman, tentunya dapat diketahui dengan melakukan evaluasi.

Evaluasi juga akan dilihat dari unsur-unsur yang mengimplementasikan kebijakan. Smith (dalam Tachjan, 2006:26) berpendapat bahwa unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah: “(1) Unsur pelaksana (implementor), (2) Adanya program yang dilaksanakan, (3) *Target groups* atau kelompok sasaran”. Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock (dalam Tachjan, 2006:28) sebagai pihak-pihak yang menandatangani kebijakan mulai dari: “Penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan dan penilaian”. Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Grace A. Franklin (dalam Tachjan, 2006:27): menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan. Dengan demikian dalam mengimplementasikan kebijakan harus ada unsur pelaksana, program yang dilaksanakan dan kelompok sasaran yang dituju. Unsur pelaksana dalam penyusunan LAKIP adalah Eselon I (Rektor, Purek) dan eselon II (Dekan, Ketua Lembaga dan Biro).

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Grindle dan Terry (dalam Tachjan, 2006:32) mengemukakan bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar dan budget. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Stagiaan (dalam Tachjan, 2006:72-73) bahwa program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a. Sasaran yang hendak dicapai, b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya, d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, dan e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Yulodo (2008:94) mengemukakan bahwa evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Kegiatan evaluasi baru dapat dilakukan, jika kegiatan pengukuran kinerja telah selesai dilakukan. Anderson (dalam Winarno, 2007:227) membagi tiga tipe evaluasi kebijakan publik yakni; evaluasi kebijakan dipaparkan sebagai kegiatan fungsional, evaluasi yang memfokuskan diri bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu dan tipe evaluasi kebijakan sistematis. Penelitian yang penulis lakukan adalah tipe fungsional yaitu dengan menggunakan kriteria-kriteria penilaian yang sama, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

Dunn (Nugroho, 2008:473) mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan berdasarkan tujuannya yaitu;

1. Evaluasi Semu, menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan.

2. Evaluasi Formal, menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.
3. Evaluasi Keputusan, menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan Mengginston (dalam Mangkunegara, 2006:10) ialah; “Penilaian prestasi kerja (*performance appraisal*) adalah suatu proses yang digunakan perusahaan untuk menentukan apakah karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya”. Selanjutnya menurut Sikula mengemukakan bahwa “Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu (barang)”. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Tujuan pokok evaluasi, bukanlah untuk menyalahkan tetapi untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Evaluasi dilakukan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan tersebut.

Menurut Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI - 2006:131), Esensi dari evaluasi adalah untuk menyediakan umpan balik (*feedback*) yang menginformasikan pada hasil yang baik menurut ukuran nyata dan obyektif. Pada hakikatnya tujuan evaluasi adalah untuk perbaikan (bila perlu, bukan dalam rangka pembuktian). Dua hal yang ingin diungkap melalui evaluasi adalah: a. Keluaran kebijakan (*policy output*) yaitu apa yang dihasilkan dengan adanya perumusan kebijakan; dan b. Hasil/dampak kebijakan (*policy outcomes/consequences*), yaitu akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan diterbitkan dan diimplementasikannya suatu kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan model penelitian evaluasi hasil. Jenis penelitian ini adalah melakukan evaluasi kebijakan terhadap hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja UNTAN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian terapan (*applied research*) yaitu Penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efisien dan efektif. Penelitian evaluasi kebijakan ini akan mendistribusikan hasil penyusunan laporan akuntabilitas yang disusun oleh Fakultas yang ada di lingkungan UNTAN. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan dengan melihat hasil dari laporan yang telah disusun. Lokasi penelitian ini dilakukan di fakultas yang ada di lingkungan Universitas Tanjungpura (UNTAN). Obyek penelitian ini adalah laporan akuntabilitas UNTAN berdasarkan kebijakan PerMen PAN dan RB No. 29 Thn. 2010, dilakukan dalam rangka menetapkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Evaluasi hasil menurut (SANKRI, 2006:132) seringkali termasuk di dalamnya analisis terhadap kekuatan/kelebihan dan kelemahan/kekurangan termasuk pula rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sedangkan subjek penelitian ini adalah Rektor sebagai informan pangkal, sebagai informan pokok adalah Pembantu Rektor II, Pembantu Rektor IV dan Dekan sedangkan sebagai informan kunci adalah Pembantu Dekan II, Kabag. Tata Usaha Fakultas, Kabag. Sistem Informasi BAPSI UNTAN, Kasubbag. Data BAPSI UNTAN dan Tim penyusun LAKIP fakultas di lingkungan UNTAN beserta karyawan/staf yang terkait dengan penelitian. Penunjukan informan pangkal menggunakan teknik *purposive* (bertujuan). Penelitian evaluasi ini dilakukan dengan teknik menurut SANKRI (2006:131) yang bersifat: a) Impresionistik dengan metode observasi dan pemanfaatan data kualitatif; dan b) Ilmiah dengan metode kajian atau penelitian. Teknik ilmiah ini dapat memberikan hasil evaluasi yang lebih akurat, obyektif, dan lebih

meyakinkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder dan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara (*Indept Interview*), observasi (*observation*), dan studi dokumen. Instrumen penelitian menggunakan panduan wawancara, panduan observasi dan pedoman dokumentasi dengan menyiapkan kamera, mengambil gambar yang terkait dengan penelitian. Cara melakukan evaluasi adalah dengan membandingkan LAKIP Fakultas dengan pedoman yang berlaku (PerMen PAN dan RB No. 29/2010). Evaluasi dilakukan dengan mengelompokkan, memberi tanda dan mengkatagorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan masalah yang ingin dijawab. Yang dievaluasi adalah penyiapan SAKIP di Fakultas di lingkungan UNTAN. LAKIP fakultas dilihat dari komponen pelaporan kinerja pada sub komponen: penyampaian informasi kinerja yang tidak/belum sesuai pedoman, dilihat dari; pengisian formulir rencana kinerja tahunan dan formulir pengukuran kinerja serta sistematika LAKIP. Penilaian dilakukan dengan menganalisis data yang telah diolah berdasarkan hasil wawancara, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dinarasikan.

HASIL PENELITIAN

A. Proses Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja

1. Proses Evaluasi

Proses evaluasi dilakukan dengan melihat laporan akuntabilitas fakultas yang disampaikan ke BAPSI UNTAN. Proses penyusunan laporan dilakukan setelah diterbitkan SK Dekan. Tim melakukan rapat koordinasi dan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Setelah laporan selesai maka dibuatkan surat pengantar laporan ke universitas dengan ditandatangani oleh Dekan. Selanjutnya Penulis melakukan evaluasi terhadap LAKIP fakultas, dengan melakukan 3 (tiga) langkah evaluasi (Suchman, dalam Winarno 2007:230) yaitu; 1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, 2. Analisis terhadap masalah, dan 3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.

2. Identifikasi Tujuan

Identifikasi tujuan yang Peneliti ambil dari LAKIP Fakultas merupakan Rencana pada Fakultas Hukum, FISIP dan FMIPA, yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Fakultas Hukum

- 1) Bidang pendidikan dan pengajaran, ditujukan untuk membekali kemampuan profesional dan mengembangkan kompetensi akademik agar lulusan dapat menerapkan dan memajukan pengetahuan keilmuan hukum yang berdaya guna dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Bidang penelitian, ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kemampuan melaksanakan penelitian berskala lokal, regional, nasional, maupun internasional, yang dapat memberikan kontribusi pada pemecahan masalah praktis dan inovasi teoritik di bidang hukum.
- 3) Bidang pengabdian pada masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan pelayanan konsultasi, sosialisasi, desiminasi dan advokasi hukum, sebagai bagian dari pengembangan kecakapan, kemampuan dan profesionalitas layanan kepada masyarakat.

b. Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

- 1) Memberikan pengetahuan yang bertaraf Nasional dan Internasional serta menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai ilmiah, berprestasi dan berdayaguna serta tidak meninggalkan pengetahuan tentang potensi khas daerah dan adat istiadat daerah Kalimantan Barat.
- 2) Melaksanakan penelitian di tingkat daerah, Nasional dan Internasional secara berkualitas tentang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, analisa ilmu sosial dan ilmu politik yang dapat dilaksanakan dan diprogramkan kepada masyarakat dalam pelaksanaan dan sosialisasinya yang profesional.

3) Menghasilkan pengabdian masyarakat dengan menyediakan informasi ilmiah yang bersifat lokal dan global di bidang ISIP.

c. Tujuan Fakultas MIPA

1) Pemerataan dan Perluasan akses: Perluasan akses Perguruan Tinggi dan peningkatan peran serta masyarakat, Penyelenggaraan pengembangan kerjasama pendidikan, Peningkatan daya tampung mahasiswa baru, Peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan, Peningkatan jumlah pemberi beasiswa, jumlah dana dan jumlah penerima beasiswa.

2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing: Peningkatan kinerja jurusan/program studi, Penambahan jumlah tenaga pengajar/dosen, Penambahan sarana dan prasarana pendidikan, Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan gedung pendidikan, Perawatan gedung pendidikan, Operasional dan pemeliharaan fasilitas, Peningkatan kemampuan dan kinerja dosen melalui studi lanjut dan pelatihan teknis, Peningkatan kemampuan dan kinerja staf administrasi melalui studi lanjut dan pelatihan teknis, Pengajuan proposal dana hibah kompetisi dan block grant, Akreditasi program studi, Penyediaan fasilitas penunjang administrasi pembelajaran dengan teknologi informasi, Peningkatan jumlah aktivitas dan dana penelitian, Peningkatan jumlah dan keragaman kegiatan PKM, Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HAKI, Peningkatan kreativitas, entrepreneurship dan kepemimpinan mahasiswa.

3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik: Peningkatan kapasitas institusi dalam perencanaan, pengelolaan, penganggaran, dan penyelenggaraan pelayanan; Peningkatan kapasitas kesehatan.

Tujuan dilakukannya evaluasi kebijakan penyusunan laporan adalah untuk melihat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) di Fakultas Hukum, FISIP dan Fakultas MIPA. Penerapan laporan dilihat dari Komponen Pelaporan Kinerja pada sub komponen penyampaian informasi kinerja. Unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada (3 unsur) berdasarkan pendapat Smith (dalam Tachjan, 2006:26), yaitu; Unsur pelaksana program yang dilaksanakan dan kelompok sasaran. Unsur pelaksana dalam penyusunan LAKIP tingkat Universitas dan Fakultas adalah Eselon I (Rektor, Purek) dan eselon II (Dekan, Pudek, Biro, Lembaga) beserta Tim. Program yang dilaksanakan adalah program universitas dan program yang ada di fakultas, yaitu kegiatan yang dilaksanakan selama 12 bulan (Januari - Desember 2011). Biaya yang dipergunakan dari dana APBN TA 2011. *Target groups* atau kelompok sasaran adalah penerima manfaat kegiatan yang telah dilakukan, yaitu sivitas akademika dan tenaga administrasi serta masyarakat sekitarnya.

Penelitian evaluasi ini dilakukan hanya pada Unsur Pelaksana (implementor), dan program yang dilaksanakan, sedangkan *Target groups* atau kelompok sasaran tidak dibahas dalam penelitian evaluasi ini, karena penekannya hanya terhadap pemenuhan hasil pelaporan. Tim penyusun LAKIP Fakultas berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Baik dari anggota tim pelaksana maupun jabatan untuk Pembantu Dekan. Jabatan yang sama pada kepanitiaan adalah Pembantu Dekan II pada masing-masing fakultas yang menjadi ketua panitia penyusunan laporan.

Tim penyusun LAKIP Fakultas Hukum mengikutsertakan Pembantu Dekan, pejabat struktural dan staf administrasi. Fakultas MIPA juga mengikutsertakan Pembantu Dekan, ditambah Ketua Jurusan, pejabat struktural dan staf administrasi, sedangkan FISIP, timnya sama dengan fakultas Hukum tidak mengikutsertakan Ketua Jurusan. Tim penyusun LAKIP tersebut adalah orang-orang yang tentunya mendapat kepercayaan dari Dekan untuk melakukan pekerjaannya dan mempunyai potensi untuk dikembangkan, seperti yang dikemukakan Mangkunegara dan Sikula (dalam Mangkunegara, 2006:10).

Panitia penyusun laporan fakultas tentunya mendapat pengawasan atau monitor dari atasan sesuai dengan jabatan strukturalnya (Pudek II/Dekan). Kepanitiaan tersebut ada dalam struktur organisasi yang jelas, lengkap, dan menyatu (Yusanto, 2003:148-150). Diketahui bahwa, SK. ditetapkan setelah Dekan menerima surat dari Rektor UNTAN (No. 8465/H22/TU/2011 tgl 26 Oktober). UNTAN (melalui BAPSI) mengirim surat ke Fakultas dan satuan kerja di lingkungan UNTAN berdasarkan surat dari Dirjen Dikti Kemdikbud (Djoko Santoso) No. 1894/E/T/2011 tgl 28 November 2011 perihal Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011. Setelah diterbitkan SK. Dekan maka tim melakukan rapat koordinasi dan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Setelah laporan selesai maka dibuatkan surat pengantar laporan ke universitas dengan ditandatangani oleh Dekan.

Laporan Universitas disampaikan melalui Sekretaris Jenderal u.p. Bagian Pembinaan Akuntabilitas Kinerja di gedung C (lantai 8). Surat tersebut juga meminta UNTAN untuk menyusun rencana kinerja tahun 2012, penetapan kinerja tahun 2012, beserta pernyataannya yang dirumuskan ke dalam kertas kerja dan fakta integritas dengan format yang telah ditentukan. Dokumen-dokumen tersebut juga disampaikan ke Dirjen Dikti Kemdikbud u.p. Bagian Informasi dan Pelaporan di gedung D. Surat Dirjen tersebut ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Dirjen Dikti Kemdikbud (Harris Iskandar, Ph.D) dengan surat No. 639/E/12/B/2012 tanggal 9 Februari 2012, perihal Penyampaian Dokumen LAKIP dan Penetapan Kinerja tahun 2012. Surat tersebut berisi permohonan agar UNTAN mengirimkan dokumen penetapan kinerja, pernyataan penetapan kinerja dan fakta integritas, karena akan ditandatangani Para Rektor dengan Dirjen Dikti pada acara Rembuknas tanggal 27-28 Februari 2012.

Setiap tahun Kemdikbud harus memperbaiki kinerjanya agar kinerja dibawahnya (Universitas) juga semakin baik. Terbukti untuk Tahun Anggaran 2013 Dirjen Dikti kembali memerintahkan Rektor untuk mengirimkan Dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun 2013 dokumen tersebut bukan saja ditandatangani antara Dirjen Dikti dengan Rektor, tetapi pada tingkat universitas dokumen tersebut juga ditandatangani antara Rektor dengan Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Kepala UPT.

Beberapa variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu; Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap dan pelaksana, dan Lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2001:79). Nigro dan Nigro (dalam Islamy, 2003:25) mengatakan; Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya tekanan-tekanan dari luar, kebiasaan lama (*konservatisme*), sifat-sifat pribadi atau karakter pelaksana, pengaruh dari kelompok luar dan pengaruh dari keadaan masa lalu.

2. Analisis Terhadap Masalah

Hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap penerapan SAKIP di fakultas adalah sebagai berikut;

- Penyampaian informasi kinerja yang tidak/belum sesuai penoman, dilihat dari; pengisian formulir rencana kinerja tahunan dan formulir pengukuran kinerja dan sistematika LAKIP disertai dengan lampiran kertas kerja dengan keterkaitan IKU, IKK dan Out put.
- Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan maka LAKIP fakultas tahun 2011, belum pernah dilakukan evaluasi. Hasil wawancara dengan Kabag. Sistem Informasi, LAKIP Universitas telah mendapatkan evaluasi dengan penilaian, baru pada tahun 2011.

- c. Panduan wawancara yang disampaikan kepada Pembantu Dekan II, Kabag dan Kasubbag. sebanyak 5 eksemplar dan yang kembali kepada Penulis ada yang tidak sejumlah tersebut di atas. Fakultas Hukum dapat diterima 5 eksemplar tetapi tidak semua jawaban terisi. Penulis melakukan konfirmasi kepada Kasubbag. Umum dan Perlengkapan bahwa jawaban tersebut disesuaikan saja dengan laporan fakultas. Fakultas FISIP hanya dapat kembali 2 eksemplar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pudek II, bahwa panduan wawancara tersebut sudah dibagikan dan pelimpahan penyusunan LAKIP memang dilimpahkan kepada Kabag. Tata Usaha. Penulis melakukan konfirmasi dengan Kabag. Tata Usaha dan memang benar apa yang dikatakan oleh Pudek II FISIP. Fakultas MIPA dapat diterima 5 eksemplar dan juga ada jawaban yang tidak terisi.
- d. Pengisian jawaban pada wawancara tidak sesuai dengan penyampaian isi laporan jawaban pada wawancara secara terstruktur, secara umum di isi dengan jawaban sangat baik dengan pilihan a atau b (5-100).
- e. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rektor UNTAN; Jika ada fakultas yang program atau kegiatannya tidak menunjang kegiatan Universitas (Renstra Universitas) maka kegiatannya tidak akan mendapatkan persetujuan atau pendanaan.

3. Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan

LAKIP fakultas tentunya dapat memberikan gambaran keadaan di fakultas dengan penjelasan pencapaian kinerja dan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setelah Penulis melakukan studi dokumentasi maka LAKIP fakultas belum seluruhnya dapat menyampaikan apa yang terdapat atau yang dimaksudkan didalam pedoman tersebut.

A. Pelaporan Kinerja

Formulir pelaporan kinerja (PerMenPAN dan RB No. 29/2010) dilihat dari informasi kinerja yang disampaikan fakultas. Formulir rencana kinerja tahunan dan pengukuran kinerja. Selain itu membuat kertas kerja yang menyampaikan informasi keterkaitan IKU, IKK dan Out Put.

1. Penyampaian Informasi Kinerja

a. Formulir Rencana Kinerja Tahunan

Yusanto (2003:148-150) berpendapat bahwa teknik pengawasan atau kegiatan melakukan evaluasi, didasarkan pada perencanaan. Perencanaan atau program yang disusun oleh fakultas ditetapkan dalam format penetapan kinerja atau format rencana kinerja tahunan. Format penetapan kinerja untuk unit organisasi eselon I, sedangkan format rencana kinerja tahunan untuk unit organisasi eselon II yang disampaikan fakultas. Dari format tersebut ditemukan perbedaan penyampaian formulir rencana kinerja tahunan (lampiran II/3-3 Permen PAN dan RB No. 29 Th 2010). Pada rencana kinerja tahunan Fakultas MIPA tidak terdapat kolom target (3). Penyampaian kolom yang tidak sesuai dengan pedoman, berakibat pada penyampaian informasi yang tidak jelas. Target kegiatan tidak dapat diketahui, sehingga tidak dapat dihitung persentase capaiannya.

b. Formulir Pengukuran Kinerja

Setelah membuat rencana kinerja tahunan, fakultas melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategisnya. Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Grindle dan Terry (dalam Tachjan, 2006:32) menyatakan, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu

kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar dan budget.

Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagian (dalam Tachjan, 2006:32-33), bahwa program harus memiliki ciri-ciri; a. Sasaran yang hendak dicapai, b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya, d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, dan e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Dari keterangan kolom tersebut ditemukan perbedaan penyampaian kolom pengukuran kinerja (lampiran III/1.5 Permen PAN dan RB No. 29 Th 2010). Perbedaan kolom pada Fakultas Hukum, FISIP dan FMIPA adalah;

1. F.H kekurangan kolom program (6), kolom pagu (7), dan kolom realisasi (8), serta kolom persentase anggaran (9).
2. FISIP kekurangan kolom program (6), kolom pagu (7), dan kolom realisasi (8), serta kolom persentase anggaran (9).
3. F. MIPA kekurangan kolom sasaran strategis (1), kolom pagu (7), dan kolom realisasi (8).

2. Sistem tila LAKIP

a. Susunan Daftar Isi

Terdapat perbedaan susunan daftar isi di dalam LAKIP Fakultas Hukum, FISIP dan Fakultas MIPA yang disampaikan ke BAPSI UNTAN.

Berdasarkan kolom tersebut dapat disimpulkan bahwa daftar isi pada LAKIP Fakultas Hukum sesuai dengan panduan. Berdasarkan Permen PAN dan RB No. 29 Th 2010 lampiran IV dapat disimpulkan adanya ketidaksesuaian pembuatan kolom pada LAKIP Fakultas FISIP dan FMIPA. Ketidaksiuaian tersebut sebagai berikut;

1. FISIP tidak menyampaikan ikhtisar eksekutif dan pada Bab III terdapat pemecahan pada Sub Bagian dan
2. F. MIPA juga melakukan pemecahan pada Sub Bagian pada Bab III.

Penyampaian kolom yang tidak sesuai dengan pedoman, berakibat pada penyampaian informasi singkat yang tidak diperoleh (FISIP). Pemecahan Sub Bagian pada Bab III menyebabkan penyampaian informasi pada LAKIP yang kurang efisien (FISIP dan F. MIPA).

b. Keterkaitan IKU, IKK dan Out put

Hasil pengukuran indikator kinerja Perguruan Tinggi dan Kopertis merupakan bagian dari hasil capaian Dikti. Keterkaitan indikator kinerja Perguruan Tinggi harus ada dan jelas keterkaitannya dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Umum (IKU) (Permen PAN dan RB No. 29/2010 psl 11). Pengukuran kinerja disertai dengan pengukuran capaian anggaran. Perlu diperhatikan keterkaitan indikator kinerja kaitannya dengan capaian output anggaran. Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

IKU dan IKK merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan Dikti. IKU yang ditetapkan sebanyak 16 indikator dengan IKK sebanyak 65 indikator. Dikti melakukan penyempurnaan terhadap IKK nya, terbukti masih ada IKU yang tidak diikuti dengan IKK (*blank*).

Berdasarkan LAKIP Fakultas Hukum, FISIP dan Fakultas MIPA maka ke tiga fakultas tidak menyampaikan penjelasan Keterkaitan IKU, IKK dan Output dalam laporannya. Terbukti dalam laporan tersebut tidak disampaikan formulir kertas kerja. Seharusnya sebelum fakultas membuat laporan, terlebih dahulu harus membuat kertas kerja yang memuat 7 (tujuh) kolom yaitu: IKU, IKK, Output, Komponen Input, Indikator Kinerja, dan Target serta Anggaran.

Penyampaian kolom yang tidak sesuai dengan pedoman, berakibat pada penyampaian informasi yang menjadi tidak jelas, tidak dapat terbaca secara cepat dan menyeluruh pada LAKIP fakultas. Program, Pagu dan Realisasi (%) tidak dapat diketahui dengan jelas. sehingga informasi yang disampaikan dalam LAKIP Fakultas tidak/belum sempurna. Kreteria-kreteria evaluasi kebijakan publik tidak secara menyeluruh (Dunn, dalam Nugroho, 2008:473) atas pertanyaan tentang; efektivitas (apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?), efisiensi (seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?), kecukupan (seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?) dan ketepatan (apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar benar berguna atau bernilai ?).

Hasil wawancara dengan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum dan FMIPA tentang perbedaan isi laporan yang tidak sesuai dengan panduan adalah terletak pada sumber data manusianya yang belum bisa menerapkan laporan sesuai dengan panduan. Sedangkan menurut Pembantu Dekan II FISIP, dikarenakan sudah merupakan pekerjaan rutin dan dianggap sudah benar.

B. Kualitas Dan Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja

1. Kualitas LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) fakultas sekurang-kurangnya menyampaikan informasi (PerMen PAN dan RB No. 29/2010 ps. 16 ayat (2) tentang; 1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 2. realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; 3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan 4. perbandingan pencapaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

a. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi

Berdasarkan studi dokumentasi yang Penulis lakukan pada Fakultas Hukum, FISIP dan Fakultas MIPA, telah menyampaikan data pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Analisa berdasarkan data observasi masing-masing fakultas sebagai berikut:

- a. Untuk Fakultas Hukum dari 15 (lima belas) sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebanyak 8 (delapan) sasaran mencapai 100% atau sebesar 53,33%.
- b. Untuk FISIP dari 9 (sembilan) sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebanyak 2 (dua) sasaran mencapai 100% atau sebesar 22,22%.
- c. Untuk Fakultas MIPA dari 22 (dua puluh dua) sasaran strategis atau program yang telah ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) sasaran mencapai 100% atau sebesar 90%.

Adapun realisasi dan penyebab tidak terpenuhinya target sesuai dengan sasaran pada kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari penjelasan pada Pencapaian Kinerja.

2. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan LAKIP fakultas maka realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi pada ke tiga fakultas tidak dapat secara detail dapat dilihat. Ketiga fakultas tidak membuat kertas kerja yang memuat IKU dan IKK. Pencapaian IKU secara umum hanya dapat dilihat dari rencana kinerja tahunan.

3. Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja

Berdasarkan LAKIP fakultas maka penjelasan atas pencapaian kinerja ke tiga fakultas adalah sebagai berikut.

a. Fakultas Hukum

1. Sekurang-kurangnya 95% mahasiswa teregistrasi, dari target yang ditetapkan sebanyak 1.700 mahasiswa, terealisasi mahasiswa yang teregistrasi sebanyak

- 1.641 mahasiswa, atau 96,53%, dikarenakan mahasiswa ada yang alpa kuliah dan mengambil cuti /stop out.
2. Prodi Ilmu Hukum terakreditasi B, dari target yang ditetapkan B, realisasi akreditasi pada tahun 2011 masih C, atau belum terealisasi, dikarenakan sampai dengan saat ini masih dalam proses reakreditasi atau pengusulan perbaikan dan perubahan akreditasi.
 3. Semua Dosen berpendidikan pasca sarjana, dari target yang ditetapkan sebanyak 75 orang dosen, realisasi dosen yang berpendidikan pascasarjana sejumlah 72 orang dosen, atau 96%. Dikarenakan pertimbangan dari dosen yang bersangkutan untuk meningkatkan jenjang studi, sedangkan pimpinan fakultas telah memprogramkan peningkatan kualitas dosen sampai pada jenjang pasca sarjana baik S2 maupun S3.
 4. Semua dosen bersertifikasi, dari target yang ditetapkan sebanyak 75 dosen, terealisasi dosen yang bersertifikasi sejumlah 66 dosen, atau 88%, dikarenakan terbatasnya kuota yang tersedia, dosen harus menunggu giliran untuk dilakukan sertifikasi periode berikutnya.
 5. Meningkatkan penelitian dosen, dari target yang ditetapkan sebanyak 20 judul, realisasi penelitian dosen sebanyak 20 judul, atau 100%.
 6. Meningkatkan jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan Dosen, dari target yang ditetapkan sebanyak 20 kegiatan, realisasi PKM dosen sebanyak 20 kegiatan, atau 100%.
 7. Meningkatkan jumlah lulusan, dari target yang ditetapkan sebanyak 400 lulusan, realisasi jumlah lulusan sebanyak 318 lulusan, atau 79,50%, dikarenakan proses dan tingkat kesulitan dalam menyelesaikan skripsi.
 8. Kerjasama dengan pihak luar, dari target yang ditetapkan sebanyak 10 kerjasama, realisasi kerjasama yang dilakukan sejumlah 6 kerjasama atau 60%, dikarenakan sulitnya menciptakan kerjasama dengan pihak luar, sampai saat ini kerjasama yang terjalin adalah dengan Komisi Yudisial RI, Mahkamah Konstitusi RI, Lembaga GIZ, Komisi Pemberantasan Korupsi berupa perekaman persidangan tindak pidana korupsi dan Pemerintah Kabupaten Landak serta Pemerintah Kabupaten Melawi.
 9. Lulusan FH UNTAN selesai studi secara tepat waktu, dari target yang ditetapkan dengan rata-rata lama studi 3 tahun 6 bulan, realisasi rata-rata masa studi 3 tahun 10 bulan, atau terealisasi.
 10. Sekurang-kurangnya IPK Lulusan 3,00, dari target yang ditetapkan rata-rata IPK 3,00, realisasi rata-rata IPK 3,30, atau terealisasi.
 11. Partisipasi dalam kegiatan akademik yang relevan (seminar, simposium, workshop atau lokakarya), dari target yang ditetapkan sebanyak 20 kegiatan, realisasi partisipasi keikutsertaan dalam kegiatan sebanyak 21 kegiatan, atau 100%.
 12. Monitoring dan evaluasi proses belajar mengajar dari target yang ditetapkan sebanyak 12 rekapitulasi, realisasi monitoring dan evaluasi sebanyak 12 rekapitulasi, atau 100%.
 13. Sekurang-kurangnya 40% mahasiswa menerima bantuan beasiswa, dari target yang ditetapkan sebanyak 400 mahasiswa, realisasi mahasiswa penerima bantuan beasiswa sebanyak 208 mahasiswa, atau 52%, dikarenakan adanya kebijakan dari mitra pemberi beasiswa yang mengurangi jumlah penerima beasiswa, disisi lain nominal beasiswa dinaikkan, disamping itu lembaga pemberi beasiswa semakin berkurang. Sampai jenis beasiswa yaitu: Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Super Semar, Djarum, PT. Taspen dan SNMPTN.

14. Meningkatkan frekuensi pertemuan senat, dari target yang ditetapkan sebanyak 6 pertemuan, realisasi pertemuan sebanyak 6 kali pertemuan, atau 100%.
15. Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana akademik (Infocus) untuk setiap kelas, dari target yang ditetapkan sebanyak 12 infocus, realisasi pengadaan infocus sebanyak 12 buah, atau 100%.

b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

1. Sekurang-kurangnya 98% (2.200 mahasiswa teregistrasi dari target yang ditetapkan sebanyak 2.000 mahasiswa). Terealisasi mahasiswa yang teregistrasi sebanyak 2.040 mahasiswa atau 92,72%.
2. Program Studi Ilmu Sosial terakreditasi C, dari target yang ditetapkan B, realisasi akreditasi pada tahun 2011 masih C atau belum terealisasi.
3. Semua dosen berpendidikan pasca sarjana, dari target yang ditetapkan sebanyak 97 dosen terealisasi dosen yang berpendidikan pasca sarjana 72 dosen atau 74,22%.
4. Semua Dosen bersertifikasi dari target yang ditetapkan sebanyak 97 orang dosen, terealisasi dosen yang bersertifikasi sejumlah 72 dosen atau 74,72%.
5. Meningkatkan penelitian dosen, dari target yang ditetapkan sebanyak 22 judul, realisasi penelitian dosen sebanyak 22 judul atau 100%.
6. Meningkatkan jumlah Pengabdian Kepada masyarakat yang dilakukan Dosen, dari target yang ditetapkan sebanyak 18 kegiatan, realisasi PKM dosen sebanyak 18 kegiatan. Atau 100%.
7. Meningkatkan jumlah lulusan, dari target yang ditetapkan sebanyak 400 lulusan, realisasi jumlah lulusan sebanyak 370 lulusan atau 92,5%.
8. Kerjasama dengan pihak luar, dari target yang ditetapkan sebanyak 10 kerjasama, realisasi kerjasama yang dilakukan sejumlah 6 kerjasama atau 60%.
9. Lulusan FISIP selesai tepat studi secara tepat waktu, dari target yang ditetapkan dengan rata-rata lama studi 3 tahun 6 bulan, realisasi rata-rata masa studi 3 tahun 9 bulan atau terealisasi.

c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

Pencapaian target kegiatan yang dibiayai oleh dana PNBPN hampir 90 % tercapai, mulai dari layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sampai kegiatan-kegiatan mahasiswa yang menunjang proses pembelajarannya. Untuk kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak terealisasi, dikarenakan dana dalam DIPA tahun 2011 tidak mencukupi.

4. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

FMIPA ada memberikan penjelasan perbandingan capaian indikator kinerja, tetapi hanya pada bidang tertentu saja sedangkan fakultas lain tidak ada. Ke tiga fakultas tidak ada memberikan penjelasan perbandingan capaian indikator kinerja sampai z

Berdasarkan data hasil observasi dan dokumentasi di atas maka kualitas LAKIP PerMen PAN dan RB No. 29/2010 psl 16 ayat (2) hasilnya sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
Fakultas Hukum, FISIP dan Fakultas MIPA telah menyampaikan data pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
Fakultas Hukum, FISIP dan FMIPA tidak memberikan realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, disebabkan karena tidak membuat Kertas Kerja yang memuat IKU dan IKK.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
Fakultas Hukum sudah memberikan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, FISIP hanya memberikan persentase tanpa memberikan penjelasan yang

memadai atas pencapaian kinerja dan FMIPA tidak memberikan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang telah direncanakan;

Berdasarkan studi dokumentasi yang Penulis lakukan, FMIPA telah memberikan penjelasan perbandingan capaian indikator kinerja, tetapi hanya pada bidang tertentu saja. Sedangkan fakultas lain tidak memberikan penjelasan. Ke tiga fakultas lainnya tidak memberikan penjelasan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan target kinerja 5 (lima) tahunan.

Dengan demikian hasil analisis akuntabilitas kinerja fakultas Hukum sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan (Permen PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 pasal 16 ayat (2)), sedangkan pada FISIP penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum seluruhnya mengacu ke pedoman yang telah ditetapkan dan Fakultas MIPA penyampaian laporannya tidak/belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penilaian LAKIP

Penilaian penyusunan laporan dilihat dari komponen pelaporan kinerja pada sub komponen penyampaian informasi kinerja. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan evaluasi (PerMen PAN dan RB No. 13/2010) maka penilaian penyusunan laporan dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu; 1. Pemenuhan pelaporan, 2. Kualitas penyajian informasi dan 3. Pemanfaatan evaluasi kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi serta studi dokumentasi maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Pelaporan Kinerja

a. Komponen Pemenuhan Pelaporan

Pemenuhan pelaporan dilihat dari dokumen penyusunan LAKIP fakultas dan ketepatan waktu penyampaian LAKIP ke Universitas (BAPSI UNTAN). Hasil dari observasi dan dokumentasi di fakultas adalah sebagai berikut;

- 1) Fakultas Hukum, FISIP dan Fakultas MIPA sudah menyusun LAKIP 2011, tetapi laporan yang disampaikan ke Universitas (BAPSI UNTAN) telah melewati batas waktu yang ditentukan. Hanya Fakultas Hukum yang menyampaikan LAKIP tepat waktu.

Fakultas Hukum menyampaikan laporan tepat pada tanggal 12 Desember 2011, FISIP menyampaikan laporan setelah bulan Desember 2011 dan Fakultas MIPA menyampaikan laporan pada tanggal 27 Desember 2011. Berdasarkan data tersebut maka ke dua fakultas mengirimkan laporannya tidak tepat waktu, kecuali Fakultas Hukum.

Ketepatan waktu penyampaian LAKIP Fakultas Hukum disebabkan karena adanya saling komunikasi dan monitoring dari Pudek II. Hasil wawancara dengan Kabag. Tata Usaha Fakultas Hukum, Pudek II selalu mengingatkan batas waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan Pudek II kepada Kabag. Tata Usahanya. Selain itu Kabag. Sistem Informasi BAPSI UNTAN juga memberikan perintah kepada bawahannya untuk berkeliling ke fakultas menagih LAKIP Fakultas.

Berdasarkan surat Rektor yang disampaikan ke fakultas (No. 8465/H22/TU/2011 tgl 26 Oktober) batas waktu penyampaian LAKIP adalah sampai dengan tanggal 12 Desember 2011. Hasil informasi dan wawancara yang diterima hal tersebut disebabkan kealpaan dan kesibukan yang ada di fakultas. Fakultas seharusnya sudah mempersiapkan laporan ke universitas sebelum batas waktu yang ditentukan, walaupun surat dari universitas belum diterima. Keterlambatan ini berakibat kepada minimnya informasi yang diterima

pihak universitas, berakibat kepada laporan yang tidak valid karena tidak didukung oleh data dan informasi yang benar.

- 2) Dokumen Renstra UNTAN belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas.

b. Komponen Kualitas Penyajian Informasi

Kualitas penyajian informasi dilihat dari rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja/kontrak kinerja. Analisis akuntabilitas kinerja merupakan lanjutan dari kegiatan pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja. Dengan melakukan analisis akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dicapai dapat dijadikan data dan informasi dalam membuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Komponen kualitas penyajian informasi ke tiga fakultas yaitu:

- 1) LAKIP Fakultas Hukum, FISIP dan Fakultas MIPA sudah menyajikan rencana kinerja tahunan; hanya Fakultas MIPA tidak mencantumkan kolom target.
- 2) LAKIP Fakultas Hukum, FISIP dan Fakultas MIPA, penyusunan laporannya (daftar isi) sudah sesuai dengan panduan, hanya pada FISIP tidak membuat kintarisat sekutif dan terdapat pemisahan Bab menjadi Sub Bagian, sama dengan Fakultas MIPA.
- 3) Ke tiga fakultas tidak menyajikan penetapan kinerja/kontrak kinerja (PK), antara Dekan Fakultas dengan Rektor UNTAN.
- 4) Penyajian informasi kinerja, LAKIP UNTAN belum menyajikan informasi mengenai kemajuan pencapaian target jangka menengah, perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya serta informasi akuntabilitas keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja belum secara rinci diuraikan.

c. Komponen Pemanfaatan Evaluasi Kinerja

Komponen pemanfaatan evaluasi kinerja pada Fakultas Hukum, FISIP dan fakultas MIPA sebagai berikut:

- 1) Belum tersedianya pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja fakultas.
- 2) Target kinerja *output* dan *outcome* belum seluruhnya dapat tercapai.
- 3) Informasi mengenai target kinerja belum dapat diandalkan secara berkala.
- 4) Informasi yang disajikan belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk digunakan oleh Fakultas Hukum dan FISIP. Baik itu dalam perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan untuk penilaian kinerja. Sedangkan Fakultas MIPA sudah memanfaatkan informasi yang ada. Indikator ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan. Berdasarkan data dari Bagian Keuangan, dana Penerimaan/Pendapatan dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke tiga fakultas tersebut mengalami beberapa variasi peningkatan pada tahun 2012 yaitu; Fakultas Hukum dari Rp.8.253.424.260,00 menjadi Rp.9.147.679.106,00 atau 10,83%. FISIP dari Rp.17.549.282.414,00 menjadi Rp.21.123.685.328,00 atau 20,37% dan FMIPA dari Rp.3.156.674.324,00 menjadi Rp.4.525.354.649,00 atau 43,36%.

2. Penilaian LAKIP Fakultas

Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja evaluasi SAKIP fakultas di lingkungan UNTAN Tahun 2011, dilaksanakan terhadap lima komponen yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Dan Capaian Kinerja. Dari lima komponen tersebut Penulis hanya menekankan pada pelaporan kinerja, evaluasi dan capaian kinerja. Tahapan-tahapan evaluasi kebijakan dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang tersedia. Hasil data yang diperoleh diolah dengan membandingkannya dengan hasil wawancara di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara terstruktur yang disampaikan, Penulis

melakukan penilaian dengan menggunakan program aplikasi *Microsoft Office Excel* dengan penilaian rata-rata (aplikasi Dikti).

Berdasarkan evaluasi di atas maka perbandingan nilai ke tiga fakultas yang dimaksud dapat dilihat nilai perbandingan sebagai berikut :

PERBANDINGAN PENILAIAN FAKULTAS

NO	KOMPONEN SAKIP	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI (%)		
			F.H	FISIP	F MIPA
1.	Pemenuhan Pelaporan	30%	30,00	15,00	15,00
2.	Kualitas Penyajian Informasi	40%	23,92	24,83	22,08
3.	Pemanfaatan Evaluasi Kinerja	30%	16,88	16,88	18,75
JUMLAH		100%	70,79	56,71	55,83

Dilihat dari laporan yang diterima maka dapat dilihat realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta ada kepatuhan dari ketiga fakultas karena sudah menyampaikan LAKIP ke universitas. Fungsi evaluasi (Wibawa dalam Nugroho, 2006:175) dapat dilakukan fakultas untuk: 1. Ekspansi, dapat di potret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati, dan 2. Kepatuhan, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan panduan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Universitas Tanjungpura (UNTAN) pada Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) yang ada di lingkungan UNTAN dapat disimpulkan; bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja UNTAN tahun 2011, belum sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Penayagaraan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (PerMen PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010. Alasan tidak tercapainya penyampaian informasi kinerja yang belum sesuai dengan pedoman, dilihat dari pengisian formulir rencana kinerja tahunan dan formulir pengukuran kinerja serta sistematika LAKIP. Proses evaluasi laporan akuntabilitas kinerja UNTAN dilakukan dengan melihat laporan fakultas yang telah disampaikan ke BAPSI UNTAN. Pelaporan Kinerja pada sub komponen penyampaian informasi kinerja fakultas tahun 2011 terdiri dari : a) Komponen Pemenuhan Pelaporan dan b) komponen Pemanfaatan Evaluasi Kinerja.

B. Saran

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemui dari hasil penelitian, saran yang diberikan untuk penyempurnaan LAKIP Fakultas di lingkungan UNTAN berdasarkan tujuan penelitian adalah:

1. Proses evaluasi laporan dan pelaporan kinerja pada sub komponen penyampaian informasi kinerja fakultas
 - a. Perlu dilakukan pelatihan atau penerapan tentang pemahaman Pedoman yang berlaku.
 - b. Pimpinan di fakultas harus melakukan komunikasi dan monitoring agar dokumen LAKIP dapat disampaikan ke Universitas sebelum batas waktu yang ditentukan agar dapat digunakan Universitas sebagai penyempurnaan dalam analisa capaian kinerja.
 - c. Dokumen Renstra Universitas agar dapat sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra fakultas dan perlu dilakukannya reviu secara berkala terhadap Renstra yang ada.

- d. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) UNTAN agar dapat sepenuhnya digunakan fakultas sebagai acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja (PK), RKT unit kerja dan penyusunan anggaran (RKA).
2. Kualitas laporan akuntabilitas kinerja fakultas.
 - a) Kualitas LAKIP harus ditingkatkan disetiap tahunnya. Untuk mempertahankannya harus dipastikan bahwa indikator kinerja telah menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur, sasaran dapat diukur secara objektif, dan ada realisasi pengukuran atas target kinerja jangka menengah (Renstra), juga penempatan data kinerjanya dapat diandalkan.
 - b) Dokumen LAKIP agar dapat menyajikan kemajuan pencapaian target kinerja jangka menengah, menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja serta perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan seharusnya informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan.
 3. Penilaian laporan akuntabilitas kinerja fakultas.
 - a) UNTAN, segera menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja dan melaksanakan evaluasi kinerja di lingkungan UNTAN. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, yaitu untuk: Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
 - b) Bagi fakultas yang tidak mengikuti pedoman dimaksud maka pimpinan universitas dapat tidak menyetujui atau tidak mendanai kegiatan-kegiatan dimaksud.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Fakultas Hukum. 2010. *Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Tahun 2010-2014*. Pontianak.
- 2011. *Laporan Akuntabilitas Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*. Pontianak.
- FISIP. 2010. *Rencana Strategis FISIP Universitas Tanjungpura Tahun 2010-2014*. Pontianak.
- 2011. *Laporan Akuntabilitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura*. Pontianak
- Fakultas MIPA. 2010. *Rencana Strategis Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura Tahun 2010-2014*. Pontianak.
- 2011. *Laporan Akuntabilitas Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura*. Pontianak
- Hafi. 2005. *Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pada proyek Peningkatan Perguruan Tinggi (P-27) Universitas Tanjungpura Pontianak*. Pontianak
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen (Edisi 2)*. Yogyakarta. BPEF
- Haryaningsih, Sri. 2013. *Materi kuliah Evaluasi Kebijakan Publik*. Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Islamy, M. Irfan. 2003, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2006. *Ringkasan Eksekutif Renstra Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009. Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025*. Jakarta: Versi Revisi Pasca Rembug Nasional Tahun 2006.
- 2010. *Rencana Strategis 2010-1014*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta.

- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugroho, D. Riant, 2006. *Kebijakan Publik, untuk Negara-negara Berkembang, Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Saiman, M. Noh. 2004, *Implementasi Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kota Pontianak*. Pontianak.
- SANKRI, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2006, *Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: API.
- Tohardi, A. 2010. *Diklat kuliah Metodologi Penelitian Sosial*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Universitas Tanjungpura. 2010/2011. *Buku Pedoman Akademik Universitas Tanjungpura*. Pontianak.
- 2010. *Renjana Strategis Universitas Tanjungpura Tahun 2010-2014*. Pontianak.
- 2011. *Penetapan Kinerja Universitas Tanjungpura Tahun 2011*. Pontianak.
- 2012. *Laporan Akuntabilitas Universitas Tanjungpura Tahun 2011*. Pontianak.
- Usman, Thamrin. *Program Kerja Calon Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2011-2015*. Pontianak.
- Wahab, Solichin Abdul, 2001, *Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, edisi kedua, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibisono, Dermawan. 2006. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Erlangga.
- Wilodo, 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Cetakan ke dua. Malang: Bayumedia Publishing.
- 2008. *Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 1989, *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Pusat Fasilitas Bersama (Bank Dunia XVII) antar Universitas Universitas Gajah Mada.
- Yusanto, M. Ismail Dkk. 2003. *Manajemen Strategis (Perspektif Syariah)*. Jakarta: Khairul Bayaan.
- Dokumen Pemerintah:**
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 095/O/2001 tanggal 19 Juni 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Mendikbud No. 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNTAN .
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 167/D/0/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Perincian Tugas Bagian dan Sub Bagian.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, No. 13 Tahun 2010 Juni 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, No. 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Internet

- Ana sejati (2012). Mengapa Hasil Evaluasi Sakip Masih Rendah?. Diunggah dari <http://www.google.com/webhp> pada tanggal 31 Januari 2013.